



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang, Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253, Fax.(022) 7798256, website : <http://www.ipdn.ac.id>

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/684/IPDN

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/435/M.SM.01.00/2020 tanggal 6 Mei 2020 Hal Rencana Pembukaan Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi Putra/Putri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

A. Persyaratan umum:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2020; dan
3. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.

B. Persyaratan administrasi:

1. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk lulusan Paket C dengan ketentuan:
 - a. Nilai Rata-rata Ijazah minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol-nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan nilai Ujian Sekolah lulusan 2017 s.d. 2020; dan

- b. Nilai Rata-rata Ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan minimal 65,00 (enam puluh lima koma nol-nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah lulusan 2017 s.d. 2020;
 2. KTP-el bagi peserta yang berusia 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el;
 3. Bagi yang belum memiliki KTP-el atau Kartu Keluarga (KK) dapat melampirkan Surat Keterangan Kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP-el yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
 4. Surat Keterangan lulus dari Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang, bagi siswa SMU/MA Tahun Ajaran 2019/2020;
 5. Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengetahui Ketua atau Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP);
 6. Alamat *e-mail* yang aktif; dan
 7. Pasfoto.
- C. Persyaratan khusus:
1. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan;
 2. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama/adat;
 3. Tidak bertato atau bekas tato;
 4. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak;
 5. Belum pernah menikah/kawin, bagi pendaftar wanita belum pernah hamil/melahirkan;
 6. Belum pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat;
 7. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai Praja IPDN, maka pendaftar:
 - a. Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
 - b. Bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN;

- d. Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN; dan
 - e. Bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan/atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, menyebarkan paham radikalisme dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual (LGBT).
8. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen persyaratan pendaftaran di atas maka pendaftar dinyatakan **GUGUR**; dan
9. Tata cara dan teknis pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat dipelajari melalui video tutorial pada laman <https://spcp.ipdn.ac.id/2020/>.

II. PENDAFTARAN

- A. Pendaftaran SPCP IPDN Tahun 2020 dilakukan bersamaan dengan pendaftaran Siswa-Siswi/Taruna-Taruni Perguruan Tinggi Kedinasan secara *online*/daring dan terpusat melalui laman <https://dikdin.bkn.go.id/> sebagaimana alur mekanisme pendaftaran di bawah ini:



- B. Selanjutnya pelamar melakukan *log in* dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan *password* yang telah didaftarkan pada laman <https://dikdin.bkn.go.id/> untuk:
1. Mengisi biodata calon peserta seleksi.
 2. Mengunggah *scanning* dokumen sebagai berikut:
 - a. KTP-el asli atau fotokopi bagi peserta yang berusia 17 Tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el, atau melampirkan Surat Keterangan Kependudukan atau resi Permintaan Pembuatan KTP-el yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan format jpg ukuran maksimal 200 kb;
 - b. Ijazah asli atau fotokopi legalisir (diunggah halaman depan dan belakang) dengan format pdf ukuran maksimal 1.000 kb;
 - c. Surat Keterangan lulus asli berstempel dari Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang, bagi siswa SMU/MA Tahun Ajaran 2019/2020 dengan format pdf ukuran maksimal 1.000 kb;
 - d. Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengetahui oleh Ketua atau Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan format pdf ukuran maksimal 1.000 kb; dan
 - e. Pasfoto berwarna (tidak hitam putih) ukuran 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kaca mata, serta mengenakan kemeja berwarna putih format jpg ukuran maksimal 200 kb.
 3. Dalam dokumen KTP-el atau KK dan Ijazah mencantumkan data yang sama untuk nama dan tempat tanggal lahir.
 4. Mencetak bukti registrasi.
- C. Apabila pendaftar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas maka pendaftar dinyatakan **GUGUR**.

III. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN TAHUN 2020

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pelamar mendaftar secara <i>online</i> /daring dengan mengakses laman https://dikdin.bkn.go.id/	8 – 23 Juni 2020
2.	Pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan Tahun 2020 melalui laman https://dikdin.bkn.go.id/	
3.	Pelamar <i>log in</i> ke laman https://dikdin.bkn.go.id/ dengan menggunakan NIK dan <i>Password</i> yang telah didaftarkan .	
4.	Pelamar memilih Sekolah Kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN.	
5.	Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek <i>resume</i> dan mencetak bukti pendaftaran.	
6.	Verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah melalui laman https://dikdin.bkn.go.id/	8 – 25 Juni 2020
7.	Pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melalui laman https://dikdin.bkn.go.id/ dan laman https://spcp.ipdn.ac.id/2020/ .	26 Juni 2020
8.	Pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai kode <i>billing</i> .	Juli 2020
9.	Pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing pada laman https://dikdin.bkn.go.id/ .	Juli 2020
10.	Pengumuman Peserta SKD melalui laman https://dikdin.bkn.go.id/ dan laman https://spcp.ipdn.ac.id/2020/	Juli 2020
11.	Pelaksanaan SKD.	Juli – Agustus 2020
12.	Pengumuman Hasil SKD melalui laman https://spcp.ipdn.ac.id/2020/	Agustus 2020
13.	Pelaksanaan Tes Kesehatan Tahap I.	Agustus – September 2020

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
14.	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Tahap I melalui laman https://spcp.ipdn.ac.id/2020/	Agustus – September 2020
15.	Pantukhir a. Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Pendaftaran b. Tes Kesehatan Tahap II	Agustus – September 2020
16.	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Tahap II melalui laman https://spcp.ipdn.ac.id/2020/	Agustus – September 2020
17.	Registrasi Calon Praja bertempat di IPDN Kampus Jatinangor	Agustus – September 2020

IV. KUOTA CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/305/M.SM.01.00/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari Siswa/Siswi IPDN Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-827 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020:

A. Kuota masing-masing Provinsi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020:

No	Provinsi	Kuota
1	Aceh	51
2	Sumatera Utara	71
3	Sumatera Barat	43
4	R i a u	29
5	Kepulauan Riau	19
6	J a m b i	27
7	Sumatera Selatan	39
8	Kepulauan Bangka Belitung	19
9	Bengkulu	25
10	Lampung	35
11	DKI Jakarta	17
12	Jawa Barat	60
13	Banten	21

No	Provinsi	Kuota
14	Jawa Tengah	75
15	D.I. Yogyakarta	15
16	Jawa Timur	82
17	Kalimantan Barat	33
18	Kalimantan Tengah	33
19	Kalimantan Timur	25
20	Kalimantan Selatan	31
21	Bali	23
22	Nusa Tenggara Barat	25
23	Nusa Tenggara Timur	49
24	Sulawesi Selatan	53
25	Sulawesi Tengah	31
26	Sulawesi Utara	35
27	Gorontalo	17
28	Sulawesi Tenggara	39
29	Maluku	27
30	Maluku Utara	25
31	Papua	63
32	Papua Barat	31
33	Sulawesi Barat	17
34	Kalimantan Utara	15
Jumlah		1.200

B. Kuota Provinsi Papua Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020:

No	Kabupaten/Kota Prov. Papua	Kuota	
		OAP	NonOAP
1.	Provinsi Papua	-	13
2.	Kota Jayapura	2	-
3.	Kabupaten Asmat	2	-
4.	Kabupaten Biak Numfor	2	-
5.	Kabupaten Boven Digoel	1	-
6.	Kabupaten Deiyai	1	-
7.	Kabupaten Dogiyai	2	-
8.	Kabupaten Intan Jaya	2	-
9.	Kabupaten Jayapura	2	-
10.	Kabupaten Jayawijaya	2	-
11.	Kabupaten Keerom	1	-
12.	Kabupaten Kep. Yapen	2	-
13.	Kabupaten Lanny Jaya	2	-
14.	Kabupaten Membramo Raya	1	-

No	Kabupaten/Kota	Kuota	
15.	Kabupaten Membramo Tengah	1	-
16.	Kabupaten Mappi	2	-
17.	Kabupaten Merauke	2	-
18.	Kabupaten Mimika	2	-
19.	Kabupaten Nabire	2	-
20.	Kabupaten Nduga	2	-
21.	Kabupaten Paniai	2	-
22.	Kabupaten Pegunungan Bintang	2	-
23.	Kabupaten Puncak	2	-
24.	Kabupaten Puncak Jaya	2	-
25.	Kabupaten Sarmi	1	-
26.	Kabupaten Supiori	1	-
27.	Kabupaten Tolikara	2	-
28.	Kabupaten Waropen	1	-
29.	Kabupaten Yahukimo	2	-
30.	Kabupaten Yalimo	2	-
Subtotal		50	13
Total		63	

C. Kuota Provinsi Papua Barat Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020:

No	Kabupaten/Kota Prov. Papua Barat	Kuota	
		OAP	nonOAP
1.	Provinsi Papua Barat	-	6
2.	Kota Sorong	2	-
3.	Kabupaten Fakfak	2	-
4.	Kabupaten Kaimana	2	-
5.	Kabupaten Manokwari	2	-
6.	Kabupaten Manokwari Selatan	2	-
7.	Kabupaten Maybrat	2	-
8.	Kabupaten Pegunungan Arfak	2	-
9.	Kabupaten Raja Ampat	2	-
10.	Kabupaten Sorong	2	-
11.	Kabupaten Sorong Selatan	2	-
12.	Kabupaten Tambrau	1	-
13.	Kabupaten Teluk Bintuni	2	-
14.	Kabupaten Teluk Wondama	2	-
Subtotal		25	6
Total		31	

V. LAIN-LAIN

- A. Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2020 tidak dipungut biaya, kecuali pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKD sebesar Rp.50.000,00 per orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara. Tata cara pembayaran biaya SKD dapat dilihat pada laman <https://dikdin.bkn.go.id/> sesuai kode *billing* yang dikeluarkan oleh BKN.
- B. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Praja IPDN Tahun 2020 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan.
- C. Pengaduan terhadap proses pendaftaran SPCP IPDN Tahun 2020 dapat disampaikan melalui:
1. Email spcpipdn@ipdn.ac.id selama pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2020;
 2. *Call Centre* SPCP IPDN Nomor 0-804-1-700-700 pada jam kerja selama masa pendaftaran SPCP IPDN dari tanggal 8 s/d 23 Juni 2020.
- D. Pemberitahuan terkait lokasi pelaksanaan tes, perubahan jadwal tahapan seleksi dan informasi lainnya terkait pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2020 dapat dilihat pada laman <https://spcp.ipdn.ac.id/2020/>.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jatinangor
Tanggal 1 Juni 2020



REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Dr. HADI PRABOWO, M.M.